

# Orientasi Budaya Politik Mahasiswa Ilmu Politik Unhas Terhadap Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Dalam Pemilu 2024 Calon Wakil Presiden Di Indonesia

Mario Aiman Saputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Hasanuddin; [mariomclaoda@gmail.com](mailto:mariomclaoda@gmail.com)

**Abstract:** Pemilihan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 yang memicu perdebatan publik terkait pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, konflik kepentingan, dan politik dinasti. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi orientasi budaya politik mahasiswa Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dalam memaknai fenomena tersebut menggunakan kerangka teori Almond dan Verba. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan teknik purposive sampling terhadap mahasiswa aktif Departemen Ilmu Politik semester V ke atas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan orientasi kognitif mahasiswa bervariasi dari pemahaman mendalam dan kritis hingga pengetahuan permukaan yang terbatas. Orientasi afektif berkisar dari kemarahan dan kekecewaan mendalam hingga sikap pragmatis, apatis, atau positif. Orientasi evaluatif menunjukkan perbedaan signifikan dari penilaian normatif berprinsip hingga pragmatis akomodatif. Integrasi ketiga orientasi tersebut menghasilkan dua kecenderungan budaya politik: partisipan yang dicirikan oleh pengetahuan mendalam, sikap kritis, dan penilaian normatif; serta subjek yang dicirikan oleh pengetahuan terbatas, sikap netral atau apatis, dan penilaian akomodatif terhadap status quo.

**Keywords:** Budaya Politik, Mahasiswa, Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, Demokrasi, Politik Dinasti

## **1. Introduction**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi prosedural, menjadi mekanisme utama bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan nasional. Di Indonesia, Pemilu 2024 menjadi salah satu momentum paling kontroversial dalam sejarah demokrasi pasca-Reformasi. Dinamika politik yang muncul tidak hanya menyangkut persaingan antar kandidat, tetapi juga menggugat batas-batas normatif demokrasi itu sendiri, terutama melalui fenomena pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, memicu perdebatan publik yang luas akibat perubahan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Awalnya, peraturan tersebut mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Namun, melalui gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), syarat tersebut diubah sehingga memungkinkan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden (Parandaru, 2023). Kontroversi semakin memuncak karena Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang jelas dan dugaan pelanggaran etika berat yang kemudian berujung pada pemberhentian Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan MK (Tempo, 2023).

Ironi historis yang tajam muncul dari fenomena ini. Reformasi 1998 lahir dari perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, nepotisme, dan absennya checks and balances. Instrumen-instrumen prosedural seperti Pemilu langsung, kebebasan pers, dan pembatasan masa jabatan presiden dipahami sebagai benteng untuk mencegah kembalinya praktik kekuasaan patrimonial dan dinastik. Namun, pencalonan Gibran menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut justru digunakan secara lentur untuk mengakomodasi kepentingan kekuasaan keluarga petahana. Pertentangan antara idealisme reformasi dan realisme politik kontemporer ini menjadi latar sosiologis penting bagi penelitian ini.

Yang menarik, di tengah gempuran kritik dan kontroversi tersebut, data exit poll Pemilu 2024 yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran justru memperoleh dukungan yang signifikan dari kalangan muda, termasuk 71% dari pemilih Gen Z (27 tahun ke bawah), dan 56,1% dari pemilih berpendidikan tinggi (Indikator Politik Indonesia, 2024). Hal ini menciptakan sebuah ironi akademis yang mendalam: mengapa kelompok yang secara struktural dan historis seharusnya menjadi garda terdepan dalam

mengawal nilai-nilai demokrasi—yakni mahasiswa—justro menunjukkan preferensi yang seolah-olah akomodatif terhadap praktik politik yang secara normatif dipertanyakan?

Secara historis, mahasiswa di Indonesia telah memainkan peran krusial dalam momen-momen kritis transformasi politik, seperti pada 1966 (runtuhnya Orde Lama) dan 1998 (runtuhnya Orde Baru). Mahasiswa tidak sekadar menjadi bagian dari pemilih pemula, melainkan agen dengan tiga pilar tanggung jawab: akademis (penguasaan pengetahuan), organisasional (kepemimpinan kolektif), dan sosial-politik (advokasi perubahan) (Akbar, 2016). Kekhasan ini menjadikan mahasiswa sebagai kelompok yang tidak mudah terpapar oleh politik populis semata, karena mereka memiliki bekal analitis dari proses sosialisasi politik terpanjang dibandingkan kelompok usia muda lainnya.

Kelompok mahasiswa Ilmu Politik menjadi subjek yang sangat relevan untuk diteliti karena secara kurikulum mereka dibekali dengan kerangka analitis untuk memahami relasi kuasa, sistem politik, dan etika penyelenggaraan negara. Mereka tidak sekadar merespons isu secara emosional, tetapi memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian yang lebih terstruktur, misalnya membedakan antara aspek legal formal dan aspek etika dari putusan MK, atau menghubungkan fenomena politik dinasti dengan teori demokrasi yang telah dipelajari di kelas. Dengan demikian, orientasi budaya politik mahasiswa Ilmu Politik dapat menjadi cermin yang jernih bagi kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Untuk membaca secara mendalam bagaimana mahasiswa memaknai fenomena kontroversial ini, penelitian ini menggunakan kerangka teori budaya politik yang dikembangkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Budaya politik didefinisikan sebagai pola orientasi psikologis individu terhadap sistem politik, yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan penilaian masyarakat terhadap politik yang membentuk sikap serta perilaku politik mereka (Almond & Verba, 1984). Almond dan Verba membagi orientasi politik ke dalam tiga dimensi utama: orientasi kognitif (pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem politik dan isu-isu yang berkembang), orientasi afektif (perasaan atau keterikatan emosional terhadap politik dan aktor politik), serta orientasi evaluatif (penilaian normatif terhadap sistem politik dan proses demokrasi). Berdasarkan orientasi tersebut, budaya politik diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, di antaranya budaya politik subjek yang ditandai oleh kesadaran terhadap sistem namun dengan sikap patuh dan menerima, serta budaya politik partisipan yang ditandai oleh kesadaran kritis dan keterlibatan aktif dalam proses politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi orientasi budaya politik mahasiswa Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dalam memaknai isu pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai

calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di tengah berbagai isu anti-demokrasi yang menyertainya. Secara lebih spesifik, penelitian ini berusaha menggali bagaimana dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif dari budaya politik mahasiswa membentuk persepsi mereka terhadap kontroversi pencalonan Gibran, serta mengklasifikasikan kecenderungan budaya politik mereka ke dalam tipe subjek atau partisipan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan sikap pro atau kontra mahasiswa, tetapi juga memahami pola-pola orientasi politik yang mendasari sikap tersebut.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka budaya politik yang belum banyak digunakan dalam studi-studi elektoral di Indonesia, terutama untuk membaca persepsi mahasiswa secara lebih mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu tentang pencalonan Gibran cenderung berfokus pada aspek komunikasi politik, efek media, dan strategi branding kandidat (Rosya, 2024; Rachmawati, 2024; Hapsari, 2024; Yani, 2024), sementara pendekatan budaya politik masih jarang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi akademik berupa pembacaan kualitatif yang lebih mendalam tentang bagaimana orientasi budaya politik mahasiswa, bukan sekadar terpaan media atau branding, membentuk persepsi mereka terhadap isu pencalonan Gibran di tengah kontroversi demokrasi, sekaligus mengisi kekosongan studi budaya politik dalam kajian elektoral di Indonesia.

## **2. Method**

Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai orientasi budaya politik mahasiswa dalam memaknai fenomena pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali nuansa, konteks, dan makna di balik tindakan politik para aktor yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2015).

Lokasi penelitian difokuskan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa FISIP Unhas memiliki tradisi kritis dan diskursus politik yang berkembang di kawasan Indonesia Timur, serta memiliki Departemen Ilmu Politik yang secara kurikulum membekali mahasiswanya dengan pengetahuan mendalam mengenai sistem politik dan isu-isu demokrasi di Indonesia. Objek penelitian ini adalah mahasiswa aktif Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas yang telah menempuh pendidikan minimal semester V dan telah lulus mata kuliah inti seperti Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, dan Perilaku Politik.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara tatap muka dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali tiga dimensi orientasi budaya politik mahasiswa, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskripsikan secara verbatim. Data sekunder diperoleh melalui kajian dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan lembaga survei, serta dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih informan secara sadar berdasarkan kriteria relevansi substantif terhadap fokus penelitian (Bungin, 2007). Kriteria informan meliputi mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Politik FISIP Unhas minimal semester V dan telah menempuh mata kuliah inti terkait sistem politik dan perilaku politik. Jumlah informan sebanyak enam orang ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru, sehingga memungkinkan peneliti melakukan wawancara mendalam secara komprehensif.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data melibatkan proses seleksi dan transformasi data kasar dari lapangan ke dalam catatan yang lebih sistematis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyelaraskan temuan lapangan dengan kerangka teori budaya politik Almond dan Verba, kemudian dilengkapi dengan verifikasi berupa pengecekan ulang terhadap catatan lapangan dan transkrip wawancara untuk memastikan keabsahan temuan.

### **3. Result and Discussion**

#### **Gambaran Umum Konteks Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang memiliki tradisi diskursus politik kritis di kawasan Indonesia Timur. Fenomena pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 menjadi latar utama penelitian. Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun, awalnya tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, setelah adanya gugatan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh pamannya sendiri, Anwar Usman, syarat tersebut diubah sehingga memungkinkan Gibran untuk maju.

Keputusan ini memicu polemik publik terkait konflik kepentingan, pelanggaran etika, dan praktik politik dinasti.

### **Orientasi Kognitif Mahasiswa**

Orientasi kognitif merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap sistem politik dan isu-isu yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap isu pencalonan Gibran bervariasi secara signifikan. Sebagian informan menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam dan kritis, mampu menjelaskan secara rinci mekanisme perubahan aturan, membedakan antara aspek prosedural hukum dan aspek etika, serta menghubungkan fenomena tersebut dengan konsep-konsep seperti independensi peradilan dan konflik kepentingan. Informan dengan orientasi kognitif tinggi mampu menempatkan fenomena pencalonan Gibran dalam kerangka yang lebih makro tentang kecenderungan politik dinasti dan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Namun demikian, sebagian informan lainnya hanya memiliki pengetahuan permukaan yang terbatas pada informasi yang beredar di media sosial. Mereka mengetahui bahwa Gibran bisa maju karena ada perubahan aturan, tetapi tidak mendalami bagaimana proses perubahan itu terjadi dan siapa saja aktor yang terlibat. Fenomena ini menunjukkan bahwa status sebagai mahasiswa Ilmu Politik tidak secara otomatis menjamin pemahaman politik yang mendalam. Faktor-faktor individual seperti intensitas mengikuti berita politik, keaktifan dalam diskusi kampus, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, serta motivasi pribadi untuk mendalami isu tertentu memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk kualitas orientasi kognitif.

Temuan penting lainnya adalah bahwa orientasi kognitif yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan sikap kritis atau menolak. Beberapa informan dengan pemahaman mendalam justru menunjukkan sikap yang cenderung pragmatis dan menerima kenyataan politik sebagai sesuatu yang tidak ideal tetapi harus dihadapi. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi kognitif saja tidak cukup untuk menjelaskan persepsi mahasiswa.

### **Orientasi Afektif Mahasiswa**

Orientasi afektif berkaitan dengan perasaan atau keterikatan emosional individu terhadap politik dan aktor politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi afektif mahasiswa terhadap pencalonan Gibran sangat beragam. Sebagian informan merasakan kemarahan, kekecewaan mendalam, dan keprihatinan terhadap praktik politik dinasti serta kemunduran demokrasi. Mereka mengekspresikan perasaan tersebut melalui partisipasi dalam aksi demonstrasi atau melalui tulisan dan diskusi di kampus. Menariknya, sebagian dari mereka

secara tegas membedakan antara rasa marah terhadap sistem dengan perasaan terhadap figur Gibran secara personal, menunjukkan bahwa kekecewaan mereka lebih merupakan ekspresi keprihatinan terhadap penyalahgunaan kekuasaan daripada kebencian pribadi terhadap kandidat.

Sebagian informan lainnya menunjukkan orientasi afektif yang cenderung netral, pragmatis, dan tidak terlalu emosional. Mereka mengakui bahwa proses pencalonan Gibran bermasalah, tetapi memilih untuk tidak membiarkan perasaan mereka terganggu oleh hal-hal yang dianggap di luar kendali. Sikap ini dapat dibaca sebagai mekanisme koping psikologis untuk mengurangi ketegangan akibat disonansi kognitif antara kesadaran akan adanya pelanggaran etika dan ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan.

Bahkan terdapat informan yang menunjukkan orientasi afektif positif terhadap Gibran, bukan karena pemahaman mendalam tentang proses politiknya, melainkan lebih karena faktor identitas generasi dan afiliasi keluarga. Temuan penting dari dimensi afektif adalah bahwa orientasi afektif tidak selalu sejalan dengan orientasi kognitif. Informan dengan kognisi tinggi bisa saja bersikap pragmatis dan tidak terlalu emosional, sementara informan dengan kognisi terbatas bisa saja bersikap positif dan mendukung.

#### **Orientasi Evaluatif Mahasiswa**

Orientasi evaluatif merujuk pada penilaian normatif individu terhadap sistem politik dan proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi evaluatif mahasiswa sangat bervariasi. Sebagian informan menunjukkan orientasi evaluatif yang sangat normatif dan berprinsip, menempatkan supremasi hukum dan etika sebagai standar absolut yang tidak boleh dikompromikan. Mereka menilai bahwa putusan MK yang memungkinkan Gibran maju adalah cacat secara etika dan tidak legitim secara moral. Mereka juga menilai bahwa praktik politik dinasti sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia karena menciptakan preseden buruk bahwa penguasa dapat mengubah aturan untuk kepentingan keluarganya.

Sebagian informan lainnya menunjukkan orientasi evaluatif yang lebih pragmatis dan realistik. Mereka mengakui bahwa pencalonan Gibran bermasalah secara etika, tetapi menilai bahwa hal tersebut tidak cukup serius untuk mengancam demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Mereka lebih memilih untuk fokus pada kinerja Gibran ke depan daripada terus menerus mempertanyakan legitimasi proses di masa lalu. Cara pandang ini mengesampingkan persoalan mendasar tentang legitimasi prosedural, padahal dalam sistem politik, legitimasi tidak hanya bergantung pada hasil tetapi juga sangat ditentukan oleh proses yang adil dan sesuai aturan.

Sebagian informan lainnya lagi menunjukkan orientasi evaluatif yang pasif dan akomodatif, menilai bahwa demokrasi Indonesia sudah cukup baik dan pencalonan Gibran sudah sah sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih lanjut. Bahkan terdapat informan yang menilai pencalonan Gibran secara positif dari perspektif representasi generasi muda, dengan menganggap bahwa masalah prosedur dan etika adalah hal yang sekunder. Pandangan ini mengabaikan konteks krusial bahwa politik dinasti menjadi sangat berbahaya bagi demokrasi ketika dijalankan dengan menggunakan instrumen negara untuk mengubah aturan guna memuluskan jalan bagi anggota keluarga.

#### **Kecenderungan Budaya Politik Mahasiswa**

Berdasarkan integrasi ketiga dimensi orientasi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kecenderungan budaya politik mahasiswa terbagi menjadi dua pola utama. Pola pertama adalah kecenderungan partisipan, yang dicirikan oleh orientasi kognitif mendalam dan kritis, orientasi afektif kuat yang diekspresikan melalui tindakan nyata atau intelektual, serta orientasi evaluatif normatif dan berprinsip. Mahasiswa dengan kecenderungan ini merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kritik, baik melalui aksi demonstrasi maupun melalui cara-cara intelektual seperti menulis dan berdiskusi. Pola kedua adalah kecenderungan subjek, yang dicirikan oleh orientasi kognitif terbatas atau pragmatis, orientasi afektif netral atau apatis, serta orientasi evaluatif akomodatif yang menerima status quo. Mahasiswa dengan kecenderungan ini cenderung menerima keputusan politik sebagai sesuatu yang berada di luar kendali mereka dan lebih memilih untuk beradaptasi secara pragmatis.

Temuan penting lainnya adalah bahwa tidak ada informan yang menunjukkan kecenderungan murni subjek atau partisipan secara absolut. Semua informan berada pada spektrum di antara kedua tipe tersebut, dengan derajat kecenderungan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa budaya politik mahasiswa tidak dapat dikategorikan secara dikotomis, melainkan harus dipahami sebagai sebuah kontinum yang dinamis. Faktor-faktor seperti intensitas keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, kebiasaan membaca dan mendiskusikan isu-isu politik, serta motivasi pribadi untuk mendalami isu-isu hukum dan ketatanegaraan tampaknya berkorelasi dengan kecenderungan partisipan.

Secara lebih luas, ironi akademis yang menjadi titik tolak penelitian dapat dijelaskan melalui dua mekanisme. Pertama, tidak semua mahasiswa memiliki orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang sama. Variasi individual sangat menentukan apakah seorang mahasiswa akan bersikap kritis atau akomodatif. Kedua, bahkan di antara mahasiswa yang memiliki orientasi kognitif tinggi dan menyadari adanya pelanggaran etika, orientasi afektif dan evaluatif mereka dapat

mengarahkan pada sikap pragmatis yang menerima status quo. Dengan demikian, budaya politik mahasiswa tidak dapat dipahami hanya dari status struktural mereka sebagai agen perubahan, tetapi harus dibaca secara lebih halus melalui ketiga dimensi orientasi politik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

#### **4. Conclusion**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi budaya politik mahasiswa Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dalam memaknai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 terbentuk melalui tiga dimensi orientasi yang saling terkait, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Ketiga dimensi tersebut bekerja secara simultan dan menghasilkan dua kecenderungan budaya politik yang berbeda.

Pertama, kecenderungan partisipan yang dicirikan oleh pengetahuan mendalam dan kritis terhadap isu pencalonan Gibran, sikap emosional yang kuat berupa kemarahan atau kekecewaan, serta penilaian normatif yang berprinsip dengan menempatkan supremasi hukum dan etika sebagai nilai yang tidak dapat dikompromikan. Mahasiswa dengan kecenderungan ini tidak hanya mengetahui dan merasakan ketidakadilan dalam proses politik, tetapi juga menyuarakan kritik melalui aksi demonstrasi atau cara-cara intelektual seperti menulis dan berdiskusi.

Kedua, kecenderungan subjek yang dicirikan oleh pengetahuan terbatas atau pragmatis, sikap netral atau apatis, serta penilaian akomodatif yang menerima status quo. Mahasiswa dengan kecenderungan ini sadar akan keberadaan sistem politik dan kontroversi yang menyertainya, tetapi cenderung menerima keputusan politik sebagai sesuatu yang berada di luar kendali mereka dan lebih memilih untuk beradaptasi secara pragmatis.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada informan yang menunjukkan kecenderungan murni subjek atau partisipan secara absolut. Semua informan berada pada spektrum di antara kedua tipe tersebut, dengan derajat kecenderungan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa budaya politik mahasiswa tidak dapat dikategorikan secara dikotomis, melainkan harus dipahami sebagai sebuah kontinum yang dinamis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa status sebagai mahasiswa Ilmu Politik tidak secara otomatis menjamin pemahaman politik yang mendalam atau sikap kritis terhadap praktik politik yang bermasalah. Faktor-faktor individual seperti intensitas mengikuti berita politik, keaktifan dalam diskusi kampus, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, serta motivasi pribadi

untuk mendalami isu tertentu memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk orientasi budaya politik mahasiswa.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam politik lokal dan nasional, orientasi budaya politik mahasiswa tidak dapat dipahami hanya dari status struktural mereka sebagai agen perubahan, tetapi harus dibaca secara lebih mendalam melalui tiga dimensi orientasi politik yang saling berinteraksi. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik yang lebih efektif di kalangan mahasiswa untuk memperkuat orientasi partisipan yang kritis terhadap nilai-nilai demokrasi, terutama di tengah maraknya praktik politik yang cenderung mengikis demokrasi substantif di Indonesia.

## References

- Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). JWP (Jurnal Wacana Politik), 1(2).
- Almond, G., & Verba, S. (1984). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (S. Simamora, Trans.). PT. Bina Aksara.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Kencana.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar.
- Hapsari, H. (2024). Pengaruh Branding Gemoy Pada Iklan Kampanye Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran Terhadap Persepsi dan Keputusan Memilih Pada Pemilih Pemula. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Heywood, A. (2014). Politik. Pustaka Pelajar.
- Indikator Politik Indonesia. (2024). Rilis Exit Poll Pemilu 2024: Basis Demografi dan Perilaku Pemilih. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/Rilis-Exit-Poll-Pilpres-2024-Indikator.pdf>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
- Parandaru, I. (2023). Perjalanan Politik Gibran Rakabuming Raka. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/perjalanan-politik-gibran-rakabuming-raka>
- Rachmawati, F. (2024). Pengaruh Terpaan Pemberitaan Pengangkatan Gibran Rakabuming Raka di Detik.com Terhadap Pengetahuan Politik dan Kepercayaan Politik Mahasiswa pada Mahkamah Konstitusi. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosya, N. F. (2024). Persepsi Generasi Z Tentang Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Setyawibawa, R. A., Harahap, R. H., Amin, M., & Achmad, N. (2024). Rivalitas Politik Dinasti. UMSU Press.
- Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tempo. (2023, Oktober 22). Bagaimana Anwar Usman Mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi. Laporan Utama. <https://www.tempo.co/kolom/skandal-mahkamah-konstitusi-819458>
- Yani, B. I. (2024). Opini Publik dan Dinasti Politik (Studi Atas Persepsi Masyarakat Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah Terhadap Pencalonan Gibran Raksabumiku Raka Sebagai Dinasti Politik Jokowi Pada PILKADA 2020). Skripsi. Universitas Sebelas Maret.